

Peran Masyarakat dalam Partisipasi Politik Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024

Hananda Avivah^{1*}, Amelia Haryanti²,

^{a mahasiswa} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang

^{b dosen} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang

¹Hanandaavivah14@gmail.com ; ²dosen00811@unpam.ac.id ;

Naskah diterima: 01-12-2022, direvisi: 18-02-2023, disetujui: 30-03-2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan partisipasi masyarakat dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2024 berkaitan dengan akan berakhirnya masa jabatan presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD dan MPR periode 2019-2021. Peran dan partisipasi politik ini mutlak dibutuhkan untuk menentukan kualitas pemimpin lima tahun mendatang. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peran dan partisipasi politik masyarakat menghadapi pemilihan umum 2024. Pengumpulan data menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan bahan literatur dan kajian pustaka. Hasil yang didapatkan bahwa peran masyarakat dapat mendukung terlaksanakannya keberhasilan pemilihan umum di tahun 2024, dan pemerintah berupaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik yang disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan yang sudah diprogramkan

Kata-kata kunci: pemilihan umum; peran masyarakat; partisipasi politik

Abstract

This study aims to determine the role and participation of the community in facing the 2024 general election related to the end of the term of office of the president, vice president, members of the DPR, DPD and MPR for the 2019-2021 period. This role and political participation is needed to determine the quality of the leader in the next five years. This paper uses a normative juridical approach method by analyzing the role and political participation of the community in the face of the 2024 general election. Data collection uses a qualitative approach by collecting literature and literature review. The results obtained that the role of the community can support the implementation of the success of the general election in 2024, and the government seeks to increase community political participation through socialization activities and political education delivered to the community through various activities that have been programmed

Key words: elections; political participation

Pendahuluan

Masa jabatan pejabat publik, dalam hal ini jabatan yang diemban oleh lembaga eksekutif dan legislatif periode 2019-2024 akan segera berakhir di tahun 2024. Sebagai negara demokrasi, berakhirnya masa jabatan ini merupakan awal dibukanya kesempatan bagi para kandidat untuk mulai mempersiapkan diri menghadapi pemilihan umum (Pemilu). Menurut Sarbaini, "Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat. Secara umum Pemilu merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan". (Sarbaini. 2015:107) Pemilu adalah wujud nyata demokrasi prosedur, meskipun demokrasi tidak sama dengan pemilihan umum, namun pemilihan umum merupakan salah satu aspek demokrasi yang sangat penting yang juga harus diselenggarakan secara demokratis. Oleh karena itu, lazimnya di negara-negara yang menamakan diri sebagai negara demokrasi mentradisikan pemilu untuk memilih pejabat-pejabat publik di bidang legislatif dan eksekutif baik pusat dan maupun daerah.

Pemilihan umum adalah suatu bentuk demokrasi langsung yang terjadi di negara Indonesia. Pemilihan umum, mementingkan pelaksanaan pemilihan yang berpegang teguh pada aspek kebebasan dalam hal memilih. Sudut pandang kompetisi berhubungan dengan warga masyarakat yang maju mencalonkan diri

sebagai pejabat publik dan strategi yang diambil guna mendukung usahanya dalam mendapatkan suara masyarakat, maka dari itu setiap kandidat melakukan pendekatan atau strategi untuk memenangkan kontestasi dalam pemilu.

Sebuah keberhasilan dalam suatu pemilu harus melalui strategi yang bagus serta terarah, guna tercapainya tujuan yang diinginkan seperti halnya dalam sebuah pemilu. Dengan strategi yang baik dan matang maka upaya memenangkan suara dalam suatu pemilihan akan terbuka. Memiliki strategi yang baik yang tersusun atas dasar perencanaan yang matang dengan pelaksanaan secara efektif dan efisien memberikan bekal untuk memenangkan suatu pemilu.

Pemilu tidak terlepas dari partisipasi politik masyarakat. Partisipasi pada hakikatnya sebagai ukuran untuk mengetahui kualitas kemampuan warga negara dalam menginterpretasikan sejumlah simbol kekuasaan (kebijaksanaan dalam mensejahterakan masyarakat sekaligus langkah-langkahnya) ke dalam simbol simbol pribadi. Bagi masyarakat yang sudah mulai berkembang dan kritis barangkali kondisi pemerintahan cenderung otoriter dan kurang terbuka itu dirasakan kurang nyaman. Oleh karena itu, mereka memimpikan sosok pemimpin yang cenderung bersifat mengayomi, jujur, dan terbuka. Perkembangan sistem politik dan demokrasi khususnya di daerah sudah menunjukkan peningkatan cukup berarti.

Hal tersebut terlihat antara lain dari tingkat antusiasme masyarakat yang cukup tinggi pada setiap penyelenggaraan pemilu,

mulai dari pendaftaran hingga saat hari pencoblosan tiba. Warga masyarakat menyambut pesta demokrasi di tempat tinggalnya masing-masing dengan berbagai sikap dan perilaku.

Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Disamping itu pula proses berikutnya melakukan upaya pelembagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya. Di kebanyakan negara yang mempraktekkan demokrasi, pemilu yang dilaksanakan secara periodik dalam tenggang waktu tertentu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari sebuah demokrasi.

Pemilu dianggap sebagai indikator utama negara demokrasi, karena dalam Pemilu rakyat menggunakan suaranya, melaksanakan hak politiknya dan menentukan pilihannya secara langsung dan bebas. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan (keharusan yang tidak bisa tidak). Rakyat menjadi factor yang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu,

penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat (teori bahwa negara ada sebagai manifestasi kehendak tuhan di muka bumi yang menjelma dalam aspirasi rakyat). Sesuatu yang tidak bisa dilepaskan ketika membahas tentang partisipasi adalah golput untuk menyebut bagi pemilih yang tidak menggunakan haknya. Fenomena golput ini ada di setiap pemilihan umum. Di hampir setiap pemilihan, jumlah golput akan dianggap sehat jika jumlah golput dalam kisaran angka 30 persen, meski banyak pemilihan jumlah golputnya melampaui titik itu, mencapai kisaran 40 persen bahkan ada yang lebih.

Sebagai partisipasi aktifnya diperlihatkan dengan terang-terangan menyatakan dukungannya dengan salah satu calon. Ada beberapa kandidat yang bersifat terbuka dan ada pula tidak terbuka, tetapi memperlihatkan kontribusi aktif dengan mendatangi lokasi tempat pemilihan guna melakukan pemungutan suara dan mencoblos gambar calon yang menjadi pilihannya pada masa waktu yang telah ditetapkan oleh panitia pelaksanaan kegiatan pemilihan umum.

Hal ini memunculkan praktik-praktik proses kampanye yang dinilai kurang mencerminkan sebagai calon pemimpin yang bersih dan berkedudukan baik dari segi keterampilan dan moral spiritualnya. Kecakapan akan ilmu dan moral menjadi sangat penting demi mewujudkan pemerintah yang demokratis namun terhindar dari praktik KKN. Dari pandangan inilah masyarakat mulai memandang bahwa pemilu hanya sebuah pertarungan antara beberapa kandidat untuk

mendapatkan jabatan. Pandangan yang seharusnya bernuansa demokratis menjadi persepsi yang berbeda dengan harapan yang ada. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui peran masyarakat pada pemilu di tahun 2024, dan upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat di tahun 2024, diharapkan masyarakat dapat mengikutinya agar pemimpin di lima tahun yang akan datang sesuai dengan harapan masyarakat yang memilihnya.

Metode

Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis persepsi masyarakat dalam menghadapi pemilu 2024 dan yang dilakukan menekankan pada pencarian norma-norma yang terkandung dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang ada, serta menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach) yakni beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2010:3) Bahan hukum yang digunakan dalam tulisan ini yakni : (1) bahan hukum primer Undang-Undang Dasar 1945, (2) bahan hukum sekunder studi keputusan yang bersumber dari buku-buku yang berkaitan dengan politik, serta buku-buku metodologi penelitian, (3) bahan hukum tersier dalam tulisan ini menggunakan berita, artikel dan risalah sidang. Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu: pemeriksaan bahan hukum, mengklarifikasi, menguji, menganalisis bahan-bahan hukum

tersebut baik primer ataupun sekunder secara normative dan yuridis formil dengan alasan-alasan peneliti untuk saling dbandingkan dalam rangka mendapatkan suatu kesimpulan. Teknik pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu : pemeriksaan bahan , mengklarifikasi, menguji, menganalisis bahan-bahan hukum tersebut baik primer ataupun sekunder secara normative dan yuridis formil dengan alasan-alasan peneliti untuk saling dbandingkan dalam rangka mendapatkan suatu kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Peran masyarakat dalam pemilihan umum tahun 2024

Berbicara Pemilu serentak tahun 2024 adalah berbicara tentang kemajuan dan masa depan Bangsa. Tentu dalam prakteknya, masyarakat jangan hanya menjadi penonton dan jangan hanya melaksanakan haknya saja tanpa melakukan apapun. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pesta demokrasi seperti halnya pemilihan umum. Oleh karenanya masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan pemilu karena merupakan satu kesatuan yang utuh dimana masyarakat menjadi faktor utama dan penentu berjalan suksesnya sebuah pelaksanaan pemilu. Pelaksanaan pemilu sangat berpengaruh terhadap proses perkembangan sebuah kebijakan pemerintah yang mengatur masyarakat banyak. Oleh karena itu sudah waktunya kita memberikan sebuah pembelajaran berharga kepada masyarakat mengenai

makna dan arti dari sebuah pemilu itu sendiri sehingga masyarakat tidak terperosok kedalam sebuah kesalahan pada saat memilih kandidat pemilu.

Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Demokrasi menghendaki adanya keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara. Rakyat diposisikan sebagai aktor penting dalam tatanan demokrasi, karena pada hakekatnya demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Keterlibatan masyarakat menjadi unsur dasar dalam demokrasi. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat.

Partisipasi politik tidak lebih dari keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan, atau juga dijelaskan secara substantif bisa berarti upaya atau usahaterorganisir oleh konstituen atau warga Negara yang baik untuk memilih para pemimpin yang mereka. Partisipasi ini mereka melakukannya dengan penuh tanggung jawab terhadap kehidupan bersama dalam lingkup suatu bangsa dan negara. Partisipasi politik ditekankan pada aspek untuk mendukung kepentingan-kepentingan atau visi dan misi elit politik tertentu. Sebagai masyarakat yang bijak kita harus turut serta dalam proses pemilihan umum dalam rangka

menentukan pemimpin yang akan memimpin kita. Dengan demikian, secara tidak langsung kita akan menentukan pembuat kebijakan yang akan berusaha mensejahterakan masyarakat secara umum. Dalam turut berpartisipasi dalam proses pemilihan umum sebagai masyarakat yang cerdas kita harus mampu menilai calon yang terbaik yang sekiranya mampu dan mau mendengarkan aspirasi masyarakat agar pembangunan yang akan dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat dan tidak memilih calon yang hanya mementingkan diri sendiri atau kelompoknya saja sehingga melupakan janji-janji yang sudah diucapkan dalam masa kampanye. Sebagai pemilik hak pilih dalam pemilu kita jangan sampai menyia-nyaiakan hak suara hanya untuk iming-iming sementara yang dalam artian kita harus memberikan suara kita kepada calon yang tepat. Ketidakikutsertaan kita sebenarnya justru akan membuat kita susah sendiri karena kita tidak turut memilih tetapi harus mengikuti pemimpin yang tidak kita pilih.

Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat di Tahun 2024

Pemilu merupakan sarana pengamalan demokrasi. Dapat dikatakan tidak ada demokrasi, tanpa pemilu. Walaupun begitu, pemilu bukanlah tujuan. Ia hanya sebagai sarana untuk memilih anggota parlemen dan pemimpin eksekutif di pusat dan daerah. Adapun tujuan kita berbangsa dan bernegara adalah antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa

sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

Pemilihan Umum merupakan pranata terpenting dalam tiap negara demokrasi, terlebih lagi bagi negara yang berbentuk Republik seperti Indonesia. Pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur. Ketiga prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin terjaga dan terlaksananya cita-cita kemerdekaan, mencegah bercokolnya kepentingan tertentu dalam tubuh tertentu di dalam pemerintahan, atau digantikannya kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan penguasa. (Mukhtie Fadjar, 2013 : 1)

Salah satu di antara elemen dan indikator yang paling mendasar dari keberhasilan dan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang demokratis adalah adanya keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses berjalannya tahapan-tahapan pemilu, khususnya dalam hal pengawasan atau pemantauan proses pemilu. Menurut Mirriam Budiardjo, “Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah.” Kegiatan itu mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen,

menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct action-nya, dan sebagainya. (Miriam Budiardjo, 2008 : 1)

Selain memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat, pendidikan pemilu juga bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai demokrasi dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mensukseskan terselenggaranya pemilu dan pemilukada. Selain itu kegiatan tersebut juga bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu yang berkualitas dan bertanggungjawab dalam kehidupan politik. Selain berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pemilihan pemilu, komisi pemilihan umum juga berusaha menarik minat pemilih pemula untuk turut berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Partisipasi pemilih pemula sangat penting sebagai pembelajaran untuk berpartisipasi dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Selain menarik minat, memberikan pemahaman dan pendidikan kepada pemilih pemula merupakan langkah yang sangat penting sehingga mereka tidak akan sembarangan dalam menentukan pilihannya. Di Indonesia sendiri, pemilih dengan kisaran usia 17-21 tahun yang berstatus pelajar dan mahasiswa ini selalu menjadi topik, sehingga komisi pemilihan umum berupaya bagaimana caranya supaya mereka berpartisipasi secara aktif dalam Pemilu.

Semua pihak setuju dan tidak mau kalau pemilih pemula tidak memiliki pendirian politik, atau suaranya malah

mengambang dalam Pemilu. Agar supaya sistem demokrasi semakin baik, dibutuhkan partisipasi semua pemilih, khususnya partisipasi pemilih pemula, hingga level partisipan bahkan level subjek. Pada kedua level ini, pemilih sudah sangat paham dan aktif terlibat pada semua tahapan pemilihan umum.

Strategi yang dilakukan lembaga penyelenggara pemilu dan pemerintah dalam menaraik minat pemilih pemula yang notabene masih muda maka strategi yang digunakanpun harus tidak jauh dari aktifitas positif anak muda. Misalnya saja lembaga pemilihan umum menyelenggarakan pertemuan pelajar dan mahasiswa dalam sebuah seminar terkait pendidikan pemilihan umum atau mengadakan pertemuan komunitas pemuda.

Dengan melalui pendidikan politik kepada pemilih pemula maka diharapkan pemilih pemula benar-benar turut berpartisipasi dalam pemilihan umum bukan hanya sekedar datang ke TPS dan mencoblos karena sebagai pengalaman pertama bagi mereka.

Keterlibatan atau partisipasi rakyat adalah hal yang sangat mendasar dalam demokrasi, karena demokrasi tidak hanya berkaitan dengan tujuan sebuah ketetapan yang dihasilkan oleh suatu pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan seluruh proses dalam membuat ketetapan itu sendiri. Partisipasi masyarakat bertujuan untuk :

- 1) Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program pemilihan

- 2) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilihan

- 3) Meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan

Menurut Joko J. Prihatmoko (2003) tujuan dari sosialisasi adalah untuk membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik, serta partisipasi politik rakyat. Pendidikan politik menjadi sangat penting untuk menumbuhkan budaya demokratis di masyarakat. Pendidikan politik memang tugas seluruh masyarakat, termasuk lembaga pendidikan dan keluarga. Sedangkan menurut Arbi Sanit (1997), “partisipasi politik adalah peran serta masyarakat secara kolektif di dalam proses penentuan pemimpin, pembuatan kebijaksanaan publik, dan pengawasan proses pemerintahan. Pemilu menjadi instrumen sangat penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tentang siapa yang berhak menjalankan organisasi yaitu negara Indonesia, baik di dalam lembaga legislative ataupun lembaga eksekutif.” Pemilu 2024 dapat terlaksana dengan baik bila didukung berbagai pihak dalam memberikan pemahaman pentingnya keterlibatan masyarakat dalam kegiatan partisipasi politik pada pemilu di tahun 2004

Kesimpulan

Partisipasi politik masyarakat akan sangat menentukan keberhasilan pemilihan umum 2024. Keberhasilan ini didukung oleh peran dari masyarakat dalam menggunakan secara

maksimal untuk menggunakan hak pilihnya, oleh karena itu peran masyarakat dengan dukungan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi politik sangat dibutuhkan mengingat masih banyak masyarakat kurang menyadari bahwa suara mereka akan menentukan kualitas pemimpin untuk lima tahun kedepan.

Referensi

Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 2008

Fadjar, Mukthie. Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi. Malang: Setara Press, 2013

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2010).

Prihatmoko, J. Joko,. Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi. Semarang: LP2I Press. 2003

Sarbaini. 2015. Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum. Jurnal Inovatif, Volume III Nomor 1.

Sanit, Arbi. Partai, Pemilu dan Demokrasi. cetakan pertama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997